

RENCANA
KERJA
PERANGKAT DAERAH
Dinas Komunikasi dan informatika
KOTA CIMAHI TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, yang juga atas berkenan-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 dapat diselesaikan. RencanaKerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pelaksanaan dan penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026.

Terimakasih pula kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 ini. Dokumen Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI	 1
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023)	 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	 18
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .	23
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	24
3.3. Program dan Kegiatan	25
 BAB IV PENUTUP	 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik pada aspek lingkungan maupun kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Cimahi.

Rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 22 Desember 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. Dengan diberlakukannya peraturan Daerah tersebut yang awalnya Dinas Komunikasi, Informatika, Kerasipan dan Perputakaan Kota Cimahi berubah menjadi dua dinas yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Arsip Daerah. Dalam Pasal 6 ayat 2 huruf p disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dengan perubahan tersebut maka harus disusun rencana kerja sebagai landasan pelaksanaan bagi program

dan kegiatan yang dilaksana oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

Dengan disusunnya rencana kerja ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat memberikan dukungan terhadap pencapaian visi misi Kota Cimahi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

- a) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
- b) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g) Kepres No. 50 tahun 1997 tentang Pedoman Umum Perpustakaan
- h) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pencana Pembangunan Daerah

- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan dokumen dasar bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah merencanakan pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai tahapan untuk mencapai target akhir Renstra untuk Mewujudkan Cimahi Kota Cerdas (Creative, Egalitarian, Religius, Developable, Accretive dan Sustainable).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimahi tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.5. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Maksud dan Tujuan,

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2022) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2022)

Berdasarkan Rencana Strategi Dinas Komuikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026, pagu anggaran Belanja yang diharapkan untuk kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 17.728.288.789,00. Perbandingan Anggaran belanja berdasarkan Rencana Strategis dengan DPA Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pagu Anggaran Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

URAIAN	Jumlah (Rp.)	Prosentase (%)
Pagu Anggaran Belanja Rencana Strategis Tahun 2022	17.728.288.789	
Pagu Anggaran Belanja DPA Tahun 2022	13.628.765.080	76,87%

Hasil evaluasi terhadap pencapaian target Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	Nilai SAKIP Dinas	BB	BB	100%
2	Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,19	3,09%	97%
3	Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	85%	93,33%	110%

Terdapat 3 urusan dan 1 non urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, yang terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan.

Pencapaian sasaran program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 Kota Cimahi per urusan sebagai berikut:

a. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

Tabel 2.5. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, Bidang Komunikasi dan Informatika

NO	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN (Rp)
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	
	BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK					
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Pengembangan e-Government Daerah	persen	80	91	2.948.870.041
1	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id	persen	86	100	1.755.846.731
2	Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase cakupan layanan TIK;	persen	50	100	1.193.023.310
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	persen	60	60	2.201.571.112
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif	persen	80	100	2.201.571.112
	URUSAN STATISTIK					
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik daerah	persen	65	93,33	254.577.732
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah publikasi Data Statistik Kota Cimahi;	publikasi	2	2	254.577.732

b. Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian

Tabel 2.6. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian

NO	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGAR AN
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISA SI 2022	
	BIDANG PERSANDIAN					
	URUSAN PERSANDIAN					
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	persen	35	100	363.137.120
1	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	persen	55	75,46	68.450.100
2	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	persen	55	100	294.687.020

c. Urusan Penunjang

Tabel 2.8. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, Urusan Penunjang

N O	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	
	URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LAKIP		75,65	75,83	6.015.589.013

N O	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	persen	100	100	41.112.498
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pesentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	persen	75	75	14.148.995
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan administrasi umum	persen	12	12	331.691.645
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	12	12	82.956.019
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	12	12	129.286.400
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang terfasilitasi pembinaan	pegawai	48	43	5.700.000
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan terlaksana	persen	100	100	5.410.693.456

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.9. Realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Pagu Anggaran Tahun 2022	13.628.765.080
2	Realisasi Anggaran s.d. Desember 2022	11.783.745.018
3	Persentase realisasi anggaran	86,46%.

Realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.10. Realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022

NO	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARAN (%)
A	BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK			
I	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
a	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.778.149.120	2.948.870.041	78,05
1	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.550.401.620	1.755.846.731	68,85
2	Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.227.747.500	1.193.023.310	97,17
b	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.384.057.700	2.201.571.112	92
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.384.057.700	2.201.571.112	92
II	URUSAN STATISTIK			
a	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	263.938.000	254.577.732	96,45
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	263.938.000	254.577.732	96,45
B	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT & PERSANDIAN			
III	URUSAN PERSANDIAN			
a	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	368.964.000	363.137.120	98,42
1	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	68.450.100	97,79
2	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	298.964.000	294.687.020	98,57
IV	SEKRETARIAT			
a	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.833.656.260	6.015.589.013	88,03
1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.448.500	41.112.498	99,19
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.200.000	14.148.995	99,64
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.829.000	331.691.645	99,96
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.566.000	82.956.019	94,74
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.843.000	129.286.400	98,81
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.700.000	5.700.000	100,00
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.222.069.760	5.410.693.456	86,96

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat disimpulkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terpenuhinya target kinerja sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi masih belum memenuhi kebutuhan organisasi.
2. Aplikasi eksisting belum tersedia yang secara khusus menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan level top management
3. Penyelenggaraan program smart city yang masih belum optimal
4. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE belum menjadi rujukan pengembangan SPBE Kota Cimahi bagi seluruh Perangkat Daerah
5. Command Center belum termanfaatkan dengan optimal, belum ada aplikasi khusus untuk dashboard Command Center
6. Kondisi Server, Perangkat Aktif Pusat Data, Perangkat Aktif Jaringan, UPS dan Kabel UTP RJ45 konektor sudah berusia lebih dari 5 tahun yang sudah rentan terhadap kerusakan.
7. Data tidak terstandar sesuai prinsip satu data.
8. Data tidak berkualitas (Tidak konsisten, tidak tepat waktu).
9. Belum ada publikasi data hasil analisis dan pengolahan.
10. Penyimpanan data sektoral belum terpusat.
11. Penyebaran informasi pembangunan daerah belum optimal.
12. Belum adanya daftar klasifikasi informasi.

Dari hasil indentifikasi dan uraian faktor-faktor di atas perlu diambil langkah dan kebijakan strategis agar sasaran dan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya.

Kebijakan dan tindakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi dengan persyaratan ketersediaan proses bisnis sebelum proses pembangunan dan pengembangan aplikasi.
2. Pembangunan aplikasi single sign on untuk kemudahan otentifikasi aplikasi
3. Pengembangan portal layanan publik cimahi smart city menjadi aplikasi layanan publik tersendiri dengan penerapan single sign on
4. Secara bertahap melakukan proses pengintegrasian secara fungsi dan data pada aplikasi layanan publik melalui kolaborasi dengan pemilik aplikasi
5. Penyusunan kebijakan sistem penghubung layanan sebagai pedoman dalam pengintegrasian aplikasi.
6. Pembentukan lembaga penyelenggara smart city baru

- Penyusunan road map implementasi program smart city sampai ke program inovasi
- Meningkatkan frekuensi pertemuan lembaga penyelenggara smart city.
- Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.
- Penyusunan daftar informasi publik.
- Optimalisasi peran PPID pembantu pada perangkat daerah,
- Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat sampai tingkat kelurahan.

Perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023)

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.11. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023	
					Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Dinas Komunikasi dan Informatika			
	I.1	Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	71 (BB)	6.736.938.232
A	I.1.1	Kegiatan	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	12 dokumen	6.106.051.632
1	I.1.1.2	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 ASN	6.090.068.332
		Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 dokumen	15.983.300
B	I.1.2	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah	12 dokumen	17.400.000
		Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 yang diasuransikan	17.400.000
B	I.1.2	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	236.116.000
14	I.1.2.11	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	22.596.400
15	I.1.2.12	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15.459.000
23	I.1.2.20	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	23.111.600

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023	
					Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
25	I.1.2.22	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	174.949.000
		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	91.079.000
	I.1.2.17	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 laporan	41.090.000
	I.1.2.15	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 laporan	3.800.000
	I.1.2.14	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 laporan	46.189.000
		Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	125.477.000
		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	49.510.000
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	55.810.000
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	20.157.000
C	I.1.3	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	100 persen	8.600.000
31	I.1.3.6	Sub Kegiatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	40 pegawai	8.600.000
D	I.1.4	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100%	78.633.000
		Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	21.128.000
		Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 dokumen	57.505.000
	III	Urusan	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	III.1	Program	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	2,5 indeks	3.430.088.800
	III.1.1	Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	85 persen	1.615.105.500

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III.1.1.1	Sub Kegiatan	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	357.400.000
III.1.1.2	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	594.205.500
III.1.1.3	Sub Kegiatan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	438.500.000
III.1.1.4	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	75.000.000
III.1.1.5	Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	150.000.000
III.1.2	Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	90 Persen	1.814.983.300
III.1.2.1	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	75 Unit	1.814.983.300
III.2	PROGRAM	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 Persen	2.107.129.800
III.2.1	Kegiatan	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif	82 Persen	2.107.129.800
III.2.1.1	Sub Kegiatan	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	241.904.800
III.2.1.2	Sub Kegiatan	<i>Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	121.960.000
III.2.1.3	Sub Kegiatan	<i>Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media</i>	Jumlah Layanan Hubungan Media	10 Layanan	1.743.265.000
V	Urusan	PERSANDIAN			
V.1	PROGRAM	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	33,33 Persen	409.280.000
V.1.1	Kegiatan	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	10 Persen	80.020.000
V.1.1.1	Sub Kegiatan	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	80.020.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023	
					Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
V.1.2	Kegiatan	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	3 Persen	329.260.000
V.1.2.1	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	106.500.000
V.1.2.2	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15 Perangkat Daerah	222.760.000
VI	Urusan	STATISTIK				
VI.1	PROGRAM	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	37 Persen	243.938.500
VI.1.1	Kegiatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	250 Data set	243.938.500
VI.1.1.1	Sub Kegiatan	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	216.750.000
VI.1.1.2	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	27.188.500

B. Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari periode Renstra Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026, pada periode renstra ini ibel berikutndikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengalami perubahan dibandingkan dengan renstra sebelumnya dengan demikian capaian kkerja dalam evaluasi hasil pelaksanaan renja sampai dengan tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Komuikasi dan Informatika Kota Cimahi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.12
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Cimahi

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	3,25	-	-	-	-	2,50	2,50	77%
1.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	90%	-	-	-	-	90%	90%	100%
1.1.1	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	77	-	-	-	-	75	75	97%
1.2.	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Persen	95	-	-	-	-	85	85	89%
1.2.1	<i>Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	-	-	-	-	1	1	25%
1.2.2	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	-	-	-	-	1	1	100%
1.2.3	<i>Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	12	-	-	-	-	3	3	25%
1.2.4	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</i>	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	4	-	-	-	-	1	1	25%
1.2.5	<i>Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</i>	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	4	-	-	-	-	1	1	25%
					-	-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	74%	-	-	-	-	60%	60%	81%
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif		87%	-	-	-	-	82%	82%	94%
2.1.1	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	48	-	-	-	-	12	12	25%
2.1.2	<i>Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	48	-	-	-	-	12	12	25%
2.1.3	<i>Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media</i>	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	10	-	-	-	-	10	10	100%
	URUSAN STATISTIK				-	-	-	-			
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Persen	87%	-	-	-	-	37%	37%	43%
3.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Data Set	1400	-	-	-	-	250	250	18%
3.1.1	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	20	-	-	-	-	20	20	100%
3.1.2	<i>Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	270	-	-	-	-	45	45	17%
	URUSAN PERSANDIAN	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	400	-	-	-	-	351	351	88%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	100	-	-	-	-	33,33%	33,33%	0%
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Persen	6	-	-	-	-	3	3	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.1.1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	10	-	-	-	-	1	1	10%
4.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	30	-	-	-	-	15	15	50%
4.2.	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	Persen	30	-	-	-	-	10	10	33%
4.2.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	20	-	-	-	-	1	1	5%
	NON URUSAN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		56,50	-	-	-	-			0%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Nilai Angka	81 (A)	-	-	-	-	71 (BB)	71 (BB)	88%
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Angka	51,50	-	-	-	-	50,00	50,00	97%
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai Angka	88,31	-	-	-	-	76,61	76,61	87%
5.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Persen	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
5.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	-	-	-	-	2	2	22%
5.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	64	-	-	-	-	16	16	25%
5.2.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;		48	-	-	-	-	12	12	25%
5.2.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	20	-	-	-	-	5	5	25%
5.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	48	-	-	-	-	12	12	25%
5.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	160	-	-	-	-	40	40	25%
5.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	-	-	-	-	15	15	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	-	-	-	-	3	3	25%
5.3.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2,35	-	-	-	-	50	50	2128%
5.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	48	-	-	-	-	12	12	25%
5.4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	64	-	-	-	-	16	16	25%
5.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	64	-	-	-	-	16	16	25%
5.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	64	-	-	-	-	16	16	25%
5.5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	48	-	-	-	-	12	12	25%
5.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	-	-	-	-	5	5	25%
5.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	-	-	-	-	1	1	25%
5.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	71	-	-	-	-	15	15	21%
5.6	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	100	-	-	-	-	100	100	100%
5.6.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	170	-	-	-	-	40	40	24%
5.7	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Dokumen	48	-	-	-	-	12	12	25%
5.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	136	-	-	-	-	34	34	25%
5.7.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	-	-	-	-	18	18	25%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.13. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Proyeksi			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	3,00	3,20	3,40	3,60	3,00	3,20	3,40	3,60
2	Indeks Keterbukaan Infromasi Publik	-	-	80%	84%	88%	92%	80%	84%	88%	92%
3	Indeks Pembangunan Statistik	-	-	2,00	3,00	3,00	4,00	2,00	3,00	3,00	4,00
4	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-	-	351	370	390	400	351	370	390	400
5	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	55,00	55,50	56,00	56,50	55,00	55,50	56,00	56,50

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari periode renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sehingga capaian kinerja belum dapat dilakukan pengukuran kinerja.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kesiapan dan kinerja pemerintah dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan. Ini adalah alat yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah telah bergerak menuju transformasi digital dalam menyelenggarakan layanan publik, mengelola data, dan berkomunikasi dengan masyarakat.

SPBE bertujuan untuk mendorong pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat melalui penggunaan TIK.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan dan transparansi informasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Indeks ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah mengungkapkan data, informasi, dan kebijakan kepada masyarakat, bisnis, atau pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merujuk pada praktik pemerintah yang mengutamakan akses terbuka dan bebas terhadap data, dokumen, dan

informasi yang relevan bagi masyarakat umum. Ini mencakup data kebijakan, data anggaran, data administratif, dan informasi lainnya yang relevan dengan tindakan dan keputusan pemerintah yang memiliki kriteria sebagai dokumen atau informasi publik. Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk mengukur tingkat keterbukaan pemerintah dan transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik.

Indeks Pembangunan Statistik merupakan alat yang digunakan untuk mengukur perkembangan dan kinerja sektor statistik. Ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebaran data statistik, yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pemantauan progres pembangunan nasional. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang Indeks Pembangunan Statistik di Indonesia:

Indeks Pembangunan Statistik mencakup aspek:

1. Kualitas data, yaitu keakuratan dan kualitas data statistik yang dihasilkan.
2. Pengolahan data, yaitu kemampuan lembaga statistik dalam mengolah data secara efisien dan handal.
3. Analisis, kemampuan dalam melakukan analisis data yang mendalam.
4. Diseminasi data, sejauh mana data statistik disebarkan secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. Sumber daya manusia menilai kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam statistik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan informasi dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Indeks ini bertujuan untuk menilai sejauh mana organisasi telah melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data dan informasi penting mereka dari ancaman keamanan, termasuk peretasan, kehilangan data, dan pelanggaran keamanan.

Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai dan memantau tingkat kesiapan dan efektifitas kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan informasi dan dirancang untuk membantu organisasi memahami risiko keamanan informasi dan untuk meningkatkan tingkat perlindungan yang ada.

Indeks.

Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan efektivitas reformasi birokrasi dalam suatu pemerintahan. Reformasi birokrasi adalah serangkaian langkah dan upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Indeks ini dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah telah berhasil mengimplementasikan reformasi birokrasi.

Analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi melaksanakan 3 urusan yang menjadi kewenangan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik. Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis layanan, yaitu:

a. Layanan Publik Secara Langsung

Terdiri dari : Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Informasi, Layanan Publikasi

b. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

Terdiri dari : Layanan Data Statistik, Layanan Publikasi, Layanan Dokumentasi, Layanan Aplikasi TIK, Layanan Infrastruktur Jaringan TIK, Layanan Persandian.

Kinerja masing-masing layanan tersebut didukung oleh beberapa aspek kinerja, sehingga untuk mengevaluasi kinerja layanan tersebut dilakukan analisa terhadap capaian indikator masing-masing aspeknya. Capaian kinerja layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai berikut:

A. Layanan Publik Secara Langsung

a. Layanan Pengaduan Masyarakat

Layanan Pengaduan Masyarakat dilakukan melalui aplikasi PESDUK (Pesan Penduduk), layanan surat baik elektronik maupun fisik, pengaduan langsung dan pengaduan melalui media massa. Secara umum layanan Pengaduan Masyarakat cukup baik karena hampir semua

pengaduan selalu direspon oleh pengelola. Namun kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah pada tindak lanjut terhadap masalah yang disampaikan oleh masyarakat yaitu tidak terkontrolnya penanganan permasalahan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu layanan Pengaduan Masyarakat belum terintegrasi dengan instansi/lembaga Pemerintah instansi vertikal antara lain kepolisian, BPN, Kementerian Agama, BPS.

b. Layanan Informasi

Layanan Informasi, secara fisik telah mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya renovasi loket pelayanan. Layanan ini didukung oleh Tim PPID Kota Cimahi yang terdiri dari PPID Utama yaitu Kepala Bidang IKPS Dinas Komunikasi dan Informatika dan PPID Pembantu yaitu Sekretaris Perangkat Daerah Kota Cimahi. Kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah:

1. Belum adanya SOP untuk melakukan Uji Konsekuensi Informasi pada PPID Kota Cimahi
2. Pengetahuan terkait Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi yang dirasa masih kurang pada PPID Pembantu di tiap Perangkat Daerah.
3. Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kota Cimahi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
4. Informasi pada website Pemerintah Kota Cimahi kurang *ter-update*

c. Layanan Publikasi

Layanan Publikasi dilaksanakan melalui media sosial dan kerjasama dengan media massa. Layanan publikasi melalui media sosial terdapat 2 yaitu Facebook dan Instagram. Publikasi melalui media sosial meliputi publikasi kegiatan-kegiatan Kepala Daerah, capaian-capaian pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta program-program prioritas. Sedangkan publikasi melalui media massa meliputi berbagai media koran/majalah, media *online*, media radio dan media

televisi. Publikasi melalui media massa meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi. *Pers release* dilakukan untuk program-program prioritas Pemerintah Kota Cimahi.

Kendala yang dihadapi dalam layanan publikasi, sebagai berikut:

1. Publikasi melalui media sosial mempunyai kecenderungan terfokus pada aktivitas Kepala Daerah dan kurang didukung oleh narasi tentang pembangunan.
2. Publikasi melalui media sosial kurang mendapat respon dari masyarakat karena kecenderungan komunikasi yang dilakukan hanya satu arah yaitu respon dari masyarakat tidak diberikan tanggapan karena tidak didukung dengan tim melainkan hanya dilaksanakan oleh operator.
3. Tidak ada *feedback* dari analisis berita yang dilakukan sebagai bahan penyusunan perencanaan publikasi.

B. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

a. Layanan Data Statistik

Untuk Layanan Data Statistik, pada tahun 2017 telah dibangun aplikasi OPEN DATA sebagai sarana publikasi data statistik sektoral Pemerintah Kota Cimahi. Sebagai Wali Data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi mempunyai tugas memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Kendala yang dihadapi dalam layanan Data Statistik adalah:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral antara “Bappeda dengan Diskominfo;
2. Pengelola Data pada PD dibebani pekerjaan pengumpulan data dari berbagai instansi (Bappeda, Setda, Kominfo, Instansi Vertikal) sehingga tidak fokus;
3. Pemahaman tentang statistik sektoral masih rendah dan masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan Statistik, kemampuan analisis dan grafis;

4. Penggunaan *Platform* yang berbeda pada aplikasi yang dibangun perangkat daerah sehingga menghambat proses integrasi.
- b. Layanan Dokumentasi
Layanan Dokumentasi dilakukan hanya kegiatan pimpinan kepala daerah.
 - c. Layanan Aplikasi TIK
Layanan Aplikasi TIK meliputi layanan domain dan subdomain, pengelolaan/kontrol aplikasi-aplikasi PD, pendampingan pembangunan aplikasi PD dan integrasi aplikasi-aplikasi PD.
 - d. Layanan Infrastruktur Jaringan TIK
Seluruh Perangkat Daerah di lingkup perkantoran Pemkot Cimahi telah tersambung dengan sambungan intranet. Sedangkan yang di luar lingkup perkantoran Pemkot Cimahi menggunakan jaringan *Fiber Optic*. Belum seluruhnya kantor layanan tersambung dengan *fiber optic* melainkan menggunakan saluran VPN. Kendala dalam layanan infrastruktur jaringan TIK yaitu:
 1. Pusat Data/Data Centre belum memadai dan bercampur dengan ruang kerja administrasi.
 2. Penggelaran Jaringan *Fiber Optic* belum menyeluruh sesuai dengan perencanaan.
 3. Implementasi dan Optimalisasi Jaringan CCTV untuk kepentingan implementasi *Smart City* belum dilakukan.
 4. Belum lengkapnya perangkat pendukung kinerja jaringan baik perangkat keras maupun perangkat lunak serta perangkat pengamanan jaringan di dalamnya.
 5. Adanya ancaman akan keamanan jaringan yang terus meningkat yang harus segera diantisipasi segera.
 6. Belum tersediannya kebijakan, standard dan prosedur.
 - e. Layanan Persandian
Layanan persandian meliputi layanan keamanan informasi, sertifikasi elektronik dan layanan persandian. Kendala yang dihadapi dalam layanan persandian adalah:
 1. Kategori Sistem Elektronik tinggi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi membutuhkan minimal tingkat kematangan tata kelola yang Terdefinisi dan Konsisten

- (tingkat III) dengan kelengkapan control keamanan yang cukup lengkap. Mengacu pada hasil penilaian mandiri dengan menggunakan instrument Indeks KAMI, tingkat kematangan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi baru ditingkat Penerapan Kerangka Kerja Dasar (tingkat II) dengan kelengkapan kontrol keamanan yang perlu perbaiki
2. Belum adanya dokumen perencanaan strategis persandian dan keamanan informasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan program/kegiatan bidang persandian dan keamanan informasi
 3. Belum ada proses penilaian kinerja keamanan informasi untuk mengukur tingkat ketercapaiannya terhadap sasaran keamanan informasi
 4. Kebijakan tata kelola keamanan informasi sudah ada, namun masih belum disesuaikan dengan regulasi maupun standar yang terbaru
 5. SOP keamanan informasi yang ada saat ini belum memenuhi semua kebutuhan organisasi, dan masih mengacu pada regulasi maupun standar lama
 6. Kurang optimalnya layanan persandian dan keamanan informasi karena belum tersediaannya sarana dan prasarana pendukung
 7. *Security*, Keamanan Aplikasi yang telah dibangun, Keamanan Akses Jaringan Internet maupun Intranet dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi disetiap SKPD;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting terkait urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut:

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang telah mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2018. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Menteri PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPBE Nasional, mengkoordinasikan proses bisnis pemerintahan, menetapkan aplikasi umum serta menetapkan manajemen SDM, manajemen risiko dan manajemen perubahan. Dalam unsur-unsur SPBE, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab pada perancangan dan pengimplementasian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada domain Penyelenggaraan Pemerintahan, serta bertanggung jawab pada domain Layanan yang menyangkut urusan penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

b. Portal Satu Data Indonesia

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan:

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
4. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

c. Command Centre

Dalam rangka “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik” Provinsi Jawa Barat akan membangun *Command Centre* untuk seluruh Kota/Kabupaten Jawa Barat dalam waktu 5 tahun, dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Pemberian bantuan diberikan secara bertahap tergantung pada kesiapan Kota/Kabupaten. *Command Center (Smart Digital Government Di Kabupaten/Kota)*, akan berfungsi

sebagai sarana Monitoring Kinerja Perangkat daerah, *Monitoring* Laporan Lapangan secara *real time*, Penyajian Informasi Eksekutif, *Video Conference*, dan Presentasi.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2024 menyatakan bahwa tema pembangunan Tahun 2024 adalah

“Pemantapan Stabilitas Perekonomian dan peningkatan Sumber Daya Manusia”.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Cimahi Tahun 2024:

- Prioritas 1 : Penguatan kualitas pelayanan kesehatan
- Prioritas 2 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
- Prioritas 3 : Peningkatan aksesibilitas perlindungan dan pelayanan sosial
- Prioritas 4 : Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat berbasis gender
- Prioritas 5 : Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya
- Prioritas 6 : Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana
- Prioritas 7 : Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- Prioritas 8 : Peningkatan iklim investasi
- Prioritas 9 : Peningkatan daya beli masyarakat
- Prioritas 10 : Peningkatan daya saing pelaku usaha ekonomi dan produk lokal
- Prioritas 11 : Menjaga ketahanan pangan daerah
- Prioritas 12 : Penyerapan tenaga kerja
- Prioritas 13 : Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota
- Prioritas 14 : Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan, dan kawasan permukiman
- Prioritas 15 : Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik
- Prioritas 16 : Fasilitasi pemilihan umum serentak

Sesuai dengan tugas dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik maka secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi menjadi bagian dari upaya mendukung prioritas 15 yaitu Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan public yakni melalui layanan pengaduan masyarakat, layanan informasi, publikasi pembangunan dan pemerintahan, layanan penyelenggaraan elektronik *government* dan layanan pengelolaan data statistik.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Kota Cimahi Tahun 2023, secara umum masyarakat Kota Cimahi mengharapkan komputerisasi dan pelatihan TIK. Sedangkan dari hasil Forum Perangkat Daerah yang melibatkan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang terkait dengan urusan-urusan dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi bahwa masyarakat Kota Cimahi pada hakekatnya mengharapkan peningkatan kinerja semua urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Infrastruktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Arahan Pembangunan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA.

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

- 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari Visi, Misi dan Agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang mengarah pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Misi, tujuan, sasaran dan target indikator utama (IKU) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah:

Tabel 3.1. Matriks Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No.	Misi Kota Cimahi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
				Uraian	Target
I	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.20
		Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Infromasi Publik	84%
		Mewujudkan data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	3.00
		Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	370

No.	Misi Kota Cimahi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
				Uraian	Target
		Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	55

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, rencana kerja Dinas Komunkasi dan Informatika Tahun 2024 terdiri dari terdiri dari 5 program, 13 kegiatan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan yang diharapkan dalam mendukung pencapaian visi misi Kota Cimahi sebagai berikut:

1. Optimalisasi peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Optimalisasi peningkatan keterbukaan informasi publik.
3. Peningkatan kualitas data statistik sektoral di Kota Cimahi.
4. Peningkatan keamanan sistem informasi lingkup Kota Cimahi.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Penjelasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 Berdasarkan Rencana Startegis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026

**Indikasi Rencana Program dan Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	02			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	Kota Cimahi	2.75	3,375,088,800	APBD		3	3,240,085,248
2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	90%	1,814,983,300	APBD		90%	1,742,383,968
2	16	03	2.01	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	75	1,814,983,300	APBD		75	1,742,383,968
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	90	1,560,105,500	APBD		95	1,497,701,280
2	16	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	1	307,400,000	APBD		1	295,104,000
2	16	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kota Cimahi	1	594,205,500	APBD		1	570,437,280
2	16	03	2.02	0007	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kota Cimahi	3	438,500,000	APBD		3	420,960,000
2	16	03	2.02	0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	1	75,000,000	APBD		1	72,000,000

2	16	03	2.02	0009		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kota Cimahi	1	145,000,000	APBD	1	139,200,000
2	16	02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	65%	2,087,129,800	APBD	70%	2,003,644,608
2	16	02	2.01			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif	Kota Cimahi	84%	2,087,129,800	APBD	86%	2,003,644,608
2	16	02	2.01	0005		Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Cimahi	12	241,904,800	APBD	12	232,228,608
2	16	02	2.01	0006		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kota Cimahi	12	121,960,000	APBD	12	117,081,600
2	16	02	2.01	0007		Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kota Cimahi	10	1,723,265,000	APBD	10	1,654,334,400
2	20		2.01			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Kota Cimahi	47%	263,938,600	APBD	67%	253,381,056
2	20	02	2.01			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Kota Cimahi	300	263,938,600	APBD	350	253,381,056
2	20	02	2.01	0001		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Cimahi	20	236,750,000	APBD	20	227,280,000
2	20	02	2.01	0002		Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Cimahi	60	27,188,600	APBD	75	26,101,056
2	21		2.01			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Kota Cimahi	50.00%	446,500,000	APBD	80.00%	428,640,000
2	21	02	2.01			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Kota Cimahi	4	366,500,000	APBD	5	351,840,000
2	21	02	2.01	0002		Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	2	86,500,000	APBD	3	83,040,000
2	21	02	2.01	0004		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Cimahi	20	280,000,000	APBD	25	268,800,000
2	21	02	2.02			Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah	Kota Cimahi	18	80,000,000	APBD	25	76,800,000

							daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;							
2	21	02	2.02	0001		Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kota Cimahi	5	80,000,000	APBD		10	76,800,000
2	16	02			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	74,50 (BB)	7,102,911,800	APBD		78,00 (BB)	7,443,403,088
2	16	01					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Kota Cimahi	50.5		APBD		51.00	-
2	16	01					Nilai IKM Perangkat Daerah	Kota Cimahi	80,61		APBD		84,61	-
2	16	01	2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Kota Cimahi	100%	70,000,000	APBD		100%	67,200,000
2	16	01	2.01	0001		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Cimahi	2	20,000,000	APBD		2	19,200,000
2	16	01	2.01	0007		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Cimahi	16	50,000,000	APBD		16	48,000,000
2	16	01	2.03			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;	Kota Cimahi	12	17,400,000	APBD		12	16,704,000
2	16	01	2.03	0002		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Cimahi	5	17,400,000	APBD		5	16,704,000
2	16	01	2.06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Cimahi	12	233,922,800	APBD		12	423,365,088
2	16	01	2.06	0004		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	40	20,403,200	APBD		40	19,588,272
2	16	01	2.06	0005		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Cimahi	15	15,459,000	APBD		15	14,840,640
2	16	01	2.06	0002		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	3	23,111,600	APBD		3	220,985,136
2	16	01	2.06	0009		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	60	174,949,000	APBD		65	167,951,040
2	16	01	2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Cimahi	12	90,800,000	APBD		12	87,168,000
2	16	01	2.08	0001		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	16	41,000,000	APBD		16	39,360,000
2	16	01	2.08	0002		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Cimahi	16	3,800,000	APBD		16	3,648,000

2	16	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	16	46,000,000	APBD	16	44,160,000
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Cimahi	12	124,000,000	APBD	12	119,040,000
2	16	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Cimahi	5	49,000,000	APBD	5	47,040,000
2	16	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Cimahi	1	55,000,000	APBD	1	52,800,000
2	16	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Cimahi	18	20,000,000	APBD	18	19,200,000
2	16	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Cimahi	100%	8,600,000	APBD	100	8,256,000
2	16	01	2.05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	40	8,600,000	APBD	45	8,256,000
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Kota Cimahi	12	6,558,189,000	APBD	12	6,721,670,000
2	16	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	34	6,523,189,000	APBD	34	6,686,269,000
2	16	01	2.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Cimahi	18	35,000,000	APBD	18	35,401,000
J U M L A H									13.275.569.000			13.369.154.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Cimahi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2024, terutama dalam rencana pencapaian kinerja.

Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam BAB III dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan asumsi penyediaan dana sesuai dengan yang diperkirakan. Rencana target kinerja dan anggaran belum mempertimbangkan aspek ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Cimahi, 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI


HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720301 199203 1 012